

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam tinjauan pustaka menjelaskan tentang teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan fokus penelitian yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka harus menjadi panduan agar fokus penelitian sesuai dengan situasi di lapangan. Selain itu, tinjauan pustaka sangat membantu dalam memberikan gambaran umum atau pembahasan yang menjelaskan mengenai konteks penelitian dan menjadi bahan pembahasan dari hasil penelitian. Satibi, (2017:196).

Adapun materi yang akan dikemukakan sebagai pemecahan masalah yaitu kajian mengenai administrasi, administrasi publik, organisasi, pengembangan sumber daya manusia, *governance*, dan *collaborative governance* serta kajian penelitian terdahulu sebagai pembanding, bahan referensi peneliti atau acuan dasar teori untuk mengembangkan kerangka pemikiran dan proposisi.

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam memperoleh referensi dan mencari pembanding dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian penelitian terdahulu berguna untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, digunakan untuk membantu penelitian yang nantinya dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas penelitian.

Sebagai penguat dalam proses penelitian ini, peneliti mencari referensi dengan substansi yang sama yang disajikan dalam penelitian terdahulu sebagai perbandingan terhadap penelitian yang lainnya dengan konteks, tema, ataupun topik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti teliti, yaitu mengenai *collaborative governance* Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Sebagai bahan pertimbangan penelitian, peneliti memilih tiga penelitian yang disajikan sebagai acuan dalam menyusun laporan skripsi, antara lain :

1) Pramuditiya (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Pramuditiya (2023) yang berjudul “*Collaborative governance Assessment* Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Dinas Pariwisata Dan Budaya Kabupaten Majalengka”, yang bertujuan untuk mengevaluasi *collaborative governance assessment* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses *collaborative governance assessment* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka sudah berjalan dengan baik karena memiliki wilayah berpotensi mengembangkan sarana industri kreatif salah satunya seni pertunjukan. Perbedaan dengan penelitian peneliti ini dapat dilihat dari lokus yang berada pada penelitian ini. Peneliti memiliki lokus di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, sedangkan penelitian Angga Pramuditiya memiliki lokus di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka. Namun, kedua penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu teori, pendekatan dan metode

penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan teori *collaborative governance* oleh Ratner dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Tabel 2. 1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Angga Pramuditiya	<i>Collaborative governance Assessment</i> Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka	<i>Collaborative governance Assessment</i> Ratner (2012)	Kualitatif	Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduksi data 2. Penyajian data 3. Penarikan Kesimpulan

Sumber : Pramuditiya, (2023)

2) Wicaksono dan Bustomi (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah Wicakono dan R Hari Bustomi pada tahun 2021 yang berjudul “*Collaborative governance* dalam Pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat di Kota Bandung”. Yang bertujuan untuk menggambarkan secara deskriptif terkait bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan pusat pemberdayaan ekonomi dan kreativitas masyarakat melalui aktivasi ruang kerja Bersama (*Co-working Space*) di Kota Bandung serta faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan yang muncul dalam proses kolaborasi saat mengimplementasikan program.

Hasil penelitian pengembangan program aktivasi *co-working space* ini dilakukan dengan melalui pendekatan sinergitas antar *stakeholders* atau *collaborative governance* dengan adanya tindakan kolaboratif *penta-helix* yang melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari: a) Akademisi, terdiri dari mahasiswa dan dosen perguruan tinggi di Kota Bandung, b) Pemerintah, terdiri dari perangkat daerah kota, kecamatan hingga tingkat kelurahan, c) Pembisnis, termasuk pelaku bisnis di pihak swasta, pelaku usaha menengah ke atas, UMKM, sentra IKM dan inkubator-inkubator bisnis, d) Komunitas, terdiri dari lembaga masyarakat di setiap kecamatan atau kelurahan serta komunitas-komunitas lainya yang terdapat di Kota Bandung, e) Media, menggunakan media sosial dan media massa dari para pemangku kepentingan baik secara individu maupun lembaga untuk menyebarkan informasi sebagai wadah sosialisasi terkait ruang kerja bersama atau *co-working space*. Proses pengembangan aktivasi ruang kerja bersama melalui 3 tahapan diantaranya yaitu: a) Tahap persemaian, tahap penumbuhan program-program dan pengenalan minat kewirausahaan, pembangkitan minat sebagai awal penumbuhan unit-unit usaha baru. b) Tahap penumbuhan kewirausahaan, terdiri dari adanya upaya pengenalan dunia usaha, penumbuhan rintisan usaha baru hingga pematapan usaha yang diselaraskan dengan kolaborasi usaha anak muda dengan masyarakat lokal di wilayahnya. c) Tahap pematapan dan akselerasi, tahapan mengkoneksikan melalui tindakan kolaborasi dengan inkubator bisnis maupun ruang kerja bersama yang telah tumbuh di kota-kota besar terutama di Kota Bandung. Melalui kerjasama kolaboratif yang dibangun untuk dapat mengakselerasi usaha – usaha yang tumbuh di ruang kerja

bersama (*co-working space*) di setiap kecamatan. 3) Hambatan-hambatan yang masih ditemui saat implementasi di lapangan seperti kekurangan dari hal teknis pelaksanaan, pendanaan, keterbatasan ruang hingga pemetaan wilayah sasaran menjadi hal yang perlu dibenahi.

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah wicaksono dan R Hari Bustomi terletak terhadap teori yang digunakan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ratner dalam Astuti et al., (2020:79-81) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan bustomi menggunakan teori *collaborative governance* menurut Nabatchi dan Balogh (2011). Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian, pendekatan dan teknik analisis data, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan teknik analisis reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Tabel 2. 2

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
2.	Ferdiansyah Wicaksono dan R Hari Bustomi	<i>Collaborative governance</i> Dalam Pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat di Kota Bandung	<i>Collaborative governance</i> Nabatchi and Balogh (2011)	Kualitatif	Deskriptif	1. Reduksi data 2. Sajian data 3. Penarikan Kesimpulan

Sumber : Wicaksono & Bustomi, (2023)

3) Rahman, Utamai dan Pancasilawan (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al., (2021) yang berjudul “Kolaborasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kreatif Di Kota Bandung Studi Pada Bandung *Creative Belt* Sektor Cigadung” yang memiliki tujuan untuk mengetahui proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata kreatif yang berada di Kota Bandung dalam meningkatkan ekonomi lokal secara berkelanjutan dengan memanfaatkan ekonomi kreatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al., (2021) terkait proses kolaborasi menurut teori Huxham dan Vangen dimensi *determination, commitment, and stamina*, meskipun memiliki komitmen yang berbeda - beda, para *stakeholder* kolaborasi memberikan perhatian khusus pada bagaimana mereka bekerja sama sebagai sebuah tim dan berusaha untuk menjaga kesinambungan dalam pekerjaan mereka agar saling mendapatkan manfaat (*output*). Komitmen akan bervariasi dari organisasi ke organisasi, tergantung pada seberapa dekat agenda mereka dengan kolaborasi (Huxham & Vangen, 1996). Secara teori *determination* (tekad) dan stamina sangat penting untuk kolaborasi yang sukses. Namun, hal tersebut akan memakan waktu yang cenderung lama dan membutuhkan ketekunan untuk terus mencoba. Oleh karena itu, perlu antisipasi demi menjaga komitmen para *stakeholder*.

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan Nurul Kaerul Rahman, Sawitri Budi Utami dan Ramadhan Pancasilawan terletak terhadap teori yang digunakan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ratner dalam Astuti et al.,

(2020:79-81). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman dkk menggunakan teori Kolaborasi menurut Huxham dan Vangen (1996). Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian, pendekatan dan teknik analisis data, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan teknik analisis reduksi data dan sajian data.

Tabel 2. 3

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakam	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
3.	Nurul Kaerul Rahman, Sawitri Budi Utami dan Ramadhan Pancasilawan	Kolaborasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kreatif Di Kota Bandung Studi Pada Bandung Creative Belt Sektor Cigadung	Kolaborasi menurut Huxham dan Vangen (1996)	Kualitatif	Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduksi data 2. Sajian data 3. Verifikasi

Sumber : Rahman et. al, (2023)

2.1.2 Konsep Dan Teori

1) Kajian Administrasi

Berdasarkan etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *administrare* yang berarti melayani atau membantu. Sementara dalam Bahasa Inggris yaitu *administration* yang berasal dari dua kata, yaitu “*ad*” (*intensive*) dan “*ministrare*” (*to serve*). Maka dari itu pengertian dari administrasi adalah pelayanan dengan baik.

Pemahaman administrasi secara sempit ini dikemukakan oleh Silalahi (2016:5), bahwa :

“Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha (*clerical work, office work*).”

Dalam kutipan di atas, administrasi ini diinterpretasikan sebagai suatu proses kegiatan penyusunan, pencatatan data dan informasi yang disusun secara sistematis yang bertujuan untuk menyediakan suatu informasi dengan mudah. Hal ini senada dengan pendapat J. Wayong dalam Silalahi, (2013:5) yang menyatakan bahwa kegiatan administrasi itu melibatkan pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan acuan bagi pimpinan.

Berdasarkan pemahaman mengenai administrasi dalam arti sempit menurut para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi dalam arti sempit pada intinya ialah kegiatan tata usaha yaitu catat mencatat yang dilakukan sebagai bahan informasi bagi kepentingan organisasi.

Sementara itu, pemahaman administrasi dalam arti luas didefinisikan oleh Silalahi (2016:5) adalah sebagai kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Administrasi dalam konteks luas ini dianggap sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Siagian (1980:2) bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kegiatan antara dua orang atau lebih yang terlibat

dalam kerja sama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. The Liang Gie juga mengemukakan bahwa administrasi adalah serangkaian kegiatan sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian administrasi dapat disimpulkan sebagai kegiatan kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan dan suatu proses atau kegiatan catat mencatat guna memberikan suatu informasi penting organisasi yang diarahkan untuk pencapaian tujuan awal dan tujuan akhir.

2) Kajian Administrasi Publik

Roosenbloom dalam Suryadi, (2007:31) menjelaskan definisi dari administrasi publik sebagai berikut :

“Public administration-is the action part of government, the means by which the purpose and goals of government are realized. Public administration a field is meanly concern with the means for implementing political value”.

Mengacu pada kutipan diatas, administrasi publik dapat dijelaskan sebagai bagian dari aktivitas pemerintah artinya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintah dapat terrealisasikan. Administrasi juga sebagai wilayah kajian yang konsen dengan nilai – nilai implementasi kebijakan politik.

Definisi diatas menunjukkan bahwa administrasi publik memiliki fokus pada program – program manajemen publik. Peranan administrasi publik dalam mewujudkan kebijakan – kebijakan politik dan menciptakan rasa aman dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan yang bersifat rutin dan pembangunan. Peran administrasi publik merupakan proses dalam perumusan kebijakan sebagaimana pendapat Nigro dan Nigro dalam Bachtiar, (2011:26) yaitu ‘*Public*

administration has and important role formulating of public policy and thus a part of political process' atau diartikan dengan administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.

Berdasarkan definisi dari para ahli yang sudah dipaparkan di atas mengenai administrasi publik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah seluruh kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai suatu sasaran atau tujuan untuk kepentingan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3) Kajian Manajemen

Manajemen berasal dari kata "*To Manage*", dalam Bahasa Inggris yang berarti "mengelola dan mengatur". Dalam arti manajemen ditunjukkan sebagai pelaksanaan tujuan pokok dan kebijaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh administrator.

Manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Hasibuan, (2017:10) mendefinisikan manajemen sebagai berikut : "Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu".

Kemudian menurut Stoner dalam (Silalahi, 2011 : 6), mendefinisikan manajemen sebagai berikut :

"Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta kepemimpinan dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta

penggunaan sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Mengacu pada kutipan diatas, manajemen dapat dijelaskan sebagai proses dalam perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Terry dalam Silalahi,(2011: 6) mengatakan bahwa: Manajemen adalah suatu proses khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengontrolan yang dilakukan dalam menentukan serta mencapai target yang sudah ditetapkan lewat pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas tersebut maka dapat ditarik kesimpulan manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan yang menggunakan sumber daya yang terdapat di dalam organisasi guna mencapai suatu tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

4) Kajian Organisasi

Organisasi menurut Waldo dalam Silalahi (2003:124) adalah struktur hubungan – hubungan diantara orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Hal senada dikemukakan oleh Herbert G. Hicks (1972:15) bahwa *‘an organization is structured process which persons interact for objectives’* atau yang diartikan bahwa organisasi adalah proses terstruktur dimana orang berinteraksi untuk suatu tujuan. Masih selaras dengan kedua definisi di atas, Siagian (1997:138) memberikan pemahaman lebih luas mengenai organisasi, yaitu:

“Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki dimana selalu terdapat hubungan antara

seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok yang disebut bawahan”.

Organisasi ini dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama dan terikat secara formal yang dimana dalam hubungan antara dua orang ini saling mempengaruhi satu sama lain sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Palls, (2020:2) Organisasi adalah suatu sistem yang saling memengaruhi satu sama lain, apabila salah satu dari subsistem tersebut rusak, maka akan mempengaruhi sub – sub sistem yang lain. Sistem tersebut dapat berjalan dengan semestinya jika individu – individu yang ada di dalamnya berkewajiban mengaturnya, yang berarti selama anggota atau individunya masih suka dan melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya maka organisasi tersebut akan berjalan dengan baik.

Merujuk pada beberapa pengertian dari para ahli mengenai organisasi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa organisasi adalah suatu tempat atau wadah berkumpulnya sekelompok orang secara terstruktur untuk melaksanakan administrasi yang memiliki tujuan yang sama.

5) Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Sedarmayanti, (2016:191) pengembangan sumber daya manusia yang berarti, perencanaan pelatihan, pelatihan, dan pengelolaan pelatihan untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia menurut Dessler adalah suatu usaha untuk meningkatkan kinerja dengan menanamkan pengetahuan, merubah sikap atau meningkatkan keahlian.

Pengembangan organisasi ini dapat diartikan sebagai perencanaan pelatihan yang dimana untuk mencapai suatu hasil yang optimal untuk meningkatkan kinerja

dengan melakukan penanaman pengetahuan, merubah sikap atau meningkatkan suatu keahlian untuk para pekerja.

Chris Rowley dan Keith Jackson dalam Sudianto & Mulyadi, (2021:42), pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pekerja, demikian juga dengan kompetensi – kompetensi yang dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan, pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan, dan manajemen pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kinerja. Tantangan untuk membangun dan melestarikan keunggulan kompetitif bukanlah tantangan jangka pendek, tetapi merupakan tantangan jangka panjang yang berkelanjutan.

Istilah pelatihan dan pengembangan (*Training and Development*) seakan menjadi dua sisi yang tidak bisa dipisahkan namun terdapat perbedaan, jika pelatihan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam waktu saat ini atau jangka pendek, sedangkan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam jangka panjang atau masa yang akan datang.

Merujuk kepada pengertian dari para ahli mengenai pengembangan sumber daya manusia yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan melalui proses pelatihan dan pendampingan untuk menekankan peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan pada saat ini.

6) Kajian Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dibutuhkan berasal dari ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era ekonomi kreatif, tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri. Habib,(2021:100)

Ekonomi Kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi. Aysa,(2020:126).

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi kreatif adalah suatu pembangunan ekonomi tanpa membatasi suatu ide, gagasan, bakat dan kreativitas yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi kreatif. Nilai ekonomi dalam ekonomi kreatif ini tidak dinilai melalui bahan baku, tetapi nilai ekonomi ini dilihat berdasarkan pemanfaatan kreativitas.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, Bidang Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa

membagi industri ekonomi kreatif ini dibagi menjadi 17 (tujuh belas) subsektor industri kreatif, yaitu :

1. Pengembangan permainan, Sub sektor kekinian yang didorong masuk ke dalam dunia pendidikan serta diperkuat dengan kebijakan proteksi untuk membangun ekosistem yang sehat dan berkontribusi dalam ekonomi kreatif.
2. Arsitektur, Arsitektur sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif memiliki peranan yang penting dari sisi kebudayaan dan pembangunan. Dari sisi budaya, arsitektur mampu menunjukkan karakter budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dari sisi pembangunan, jelas arsitektur berperan dalam perancangan pembangunan sebuah kota.
3. Desain Produk, merupakan hasil dari subsektor ini, desain produk yang mengkreasikan sebuah produk dengan menggabungkan unsur fungsi dan estetika sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat.
4. Fesyen, merupakan subsektor industri kreatif yang berjalan sangat dinamis. Berbagai tren fesyen bermunculan setiap tahun karena inovasi dan produktifitas desainer.
5. Desain interior. Penggunaan jasa *desainer* dalam merancang interior hunian, hotel hingga perkantoran,
6. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual atau sering dikenal dengan singkatan DKV merupakan ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dengan memanfaatkan elemen visual yang mempelajari konsep

komunikasi dengan memanfaatkan elemen visual sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu.

7. Seni pertunjukan, merupakan pertunjukan yang sering diadakan ketika sedang mengadakan kegiatan kesenian berbentuk wayang teater, ludruk, tari, dan masih banyak lagi.
8. Film, animasi dan video, Industri perfilman saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat positif. Berbagai judul film silih berganti dalam pertunjukan film di Indonesia, animasi juga menunjukkan perkembangan yang bagus dalam karya anak bangsa.
9. Fotografi, dalam perkembangan industri fotografi didukung oleh minat anak muda sekarang yang semakin tinggi terhadap dunia fotografi, menjadikan fotografi ini sebagai perkembangan ekonomi kreatif,
10. Kriya, merupakan kerajinan yang terbentuk dari hasil tangan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kerajinan seni kriya.
11. Kuliner memiliki potensi yang kuat untuk berkembang. Data dari Bekraf menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang kontribusi sebanyak 30% dari data total sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Beberapa hal masih menjadi perhatian pemerintahan yaitu akses perizinan satu pintu, panduan bisnis dan perizinana, hingga pendampingan hukum dalam proses pendirian usaha.
12. Musik merupakan industri yang sangat dinamis. Perkembangan terbaru saat ini di dunia musik adalah semakin banyaknya platform pembelian

musik digital yang mudah dan murah sehingga mengurangi aksi pembajakan.

13. Penerbitan, industri penerbitan berperan dalam membangun kekuatan intelektualitas bangsa. Meskipun pasar industri ini tidak sebesar sektor lain, namun industri ini mempunyai potensi yang tidak kalah kuat. Banyak penerbitan seperti buku dan majalah dalam bentuk digital.
14. Periklanan, periklanan merupakan suatu sajian materi yang berisi pesan persuasif kepada masyarakat untuk mempromosikan suatu produk atau jasa. Konten-konton iklan biasanya dibuat khusus oleh sekelompok orang yang biasanya disebut sebagai agensi iklan.
15. Seni Rupa, Seni rupa di Indonesia sangat berkembang di Indonesia dengan cukup baik. Tercatat ada beberapa acara pameran senirupa rutin yang diselenggarakan.
16. Televisi dan radio adalah dua bentuk media massa yang berperan penting dalam menyampaikan informasi, hiburan, dan budaya kepada *audiens* mereka.
17. Subsektor "aplikasi" dalam ekonomi kreatif mengacu pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan, produksi, dan distribusi perangkat lunak atau aplikasi komputer yang memiliki nilai kreatif dan inovatif. Ini adalah bagian penting dari industri teknologi informasi (TI) yang fokus pada kreativitas dan inovasi dalam pengembangan perangkat lunak.

7) **Kajian Governance**

Istilah *governance* ini sebagai bentuk kata ganti dari “*Government*”, pemahaman ini sangat umum ditemukan akan tetapi perlu dipahami bahwa *Governance* bukanlah sinonim dari *government*. *Governance* ini memiliki perhatian penting dalam keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya sudah semakin kompleks akan tantangan dan permasalahan yang dihadapi.

Menurut Roderick Arthur William Rhodes, mengatakan bahwa *governance* merujuk pada perubahan dari tata Kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan (*New Process of Governing*), perubahan kondisi kaidah pengaturan (*a Changed Condition Ordered rule*), atau sebuah metode baru dimana masyarakat diatur (*new method by which society is governed*), Rhodes, (1996:653).

Maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pemaparan dari para ahli tentang *Governance*, bahwa *Governance* merupakan penyelenggaraan kebijakan publik atau tata kelola pemerintah yang dimana pada saat pelaksanaannya tidak berpusat pada pemerintah saja, namun melibatkan beberapa aktor lainnya untuk berpartisipasi baik dari masyarakat, swasta maupun media.

Menurut Purwadianto dalam Garmana, (2020:4) *Good governance* merupakan seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi yang menjadi panduan dalam penentuan keputusan. *Good governance* yang dapat dilaksanakan dan dipatuhi secara baik dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Sedangkan menurut UNDP dalam kebijakannya yang berjudul *Governance for*

Sustainable (1997) mendefinisikan bahwa pemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan dan atau kekuasaan di bidang ekonomi. Politik dan administratif, untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan kebijakan negara, yang mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *good governance* merupakan pelaksanaan pemerintahan secara baik yang mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, selain itu sebagai pelaksanaan pemerintahan dalam mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan kebijakan negara dalam mendorong terciptanya kondisi yang sejahtera, terintegritas dan kohesitas sosial dalam masyarakat.

8) Kajian *Collaborative governance*

Collaborative Governance menurut Ansell and Gash menjelaskan bahwa strategi baru dari pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan kolaborasi atau *Collaborative Governance*. dari *Governance* yang melibatkan berbagai *stakeholders* secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama Chris & Gash, (2007:559).

Collaborative governance ini dapat diartikan sebagai strategi baru yang berada di pemerintahan guna melakukan suatu kolaborasi yang melibatkan berbagai *stakeholders* secara bersamaan yang memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan untuk berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam membuat suatu keputusan pemerintahan.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Palls (2023:11-20) *Collaborative governance* dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor *Governance*. Melalui perpesktif *Collaborative Governance*, tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai. Palls, (2023:11-12). Merujuk dalam beberapa pengertian dari para ahli mengenai *Collaborative governance* yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Collaborative governance* merupakan suatu proses kerjasama antar beberapa aktor dalam menuju suatu tujuan bersama.

Collaborative governance menurut Ratner dalam Astuti et al., (2020:79-81) ini terdapat tiga fokus fase atau tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi yang meliputi :

1. Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*)

Fase pertama ini adalah fase mendengarkan. Pada tahap ini para pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses kolaboratif. Pada tahap ini setiap pemangku kepentingan saling menerangkan mengenai permasalahan, dan pemangku kepentingan lain saling mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Kemudian memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti solusi dari permasalahan yang akan terjadi.

Setiap pemangku kepentingan memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang berupa achievement yang dapat diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat. Pada dasarnya, fase ini merupakan fase saling mendengarkan mengenai permasalahan dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan dari setiap permasalahan yang diterangkan oleh masing-masing pemangku kepentingan.

2. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

Pada tahap ini adalah fase dialog, pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam kolaborasi yang telah diterangkan.

3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*)

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses kolaborasi dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada tahap ini pemangku kepentingan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kemudian mengidentifikasi

pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berlangsung dalam jangka panjang.



Sumber : Ratner dalam Astuti et al, (2020:79-81)

Gambar 2. 1

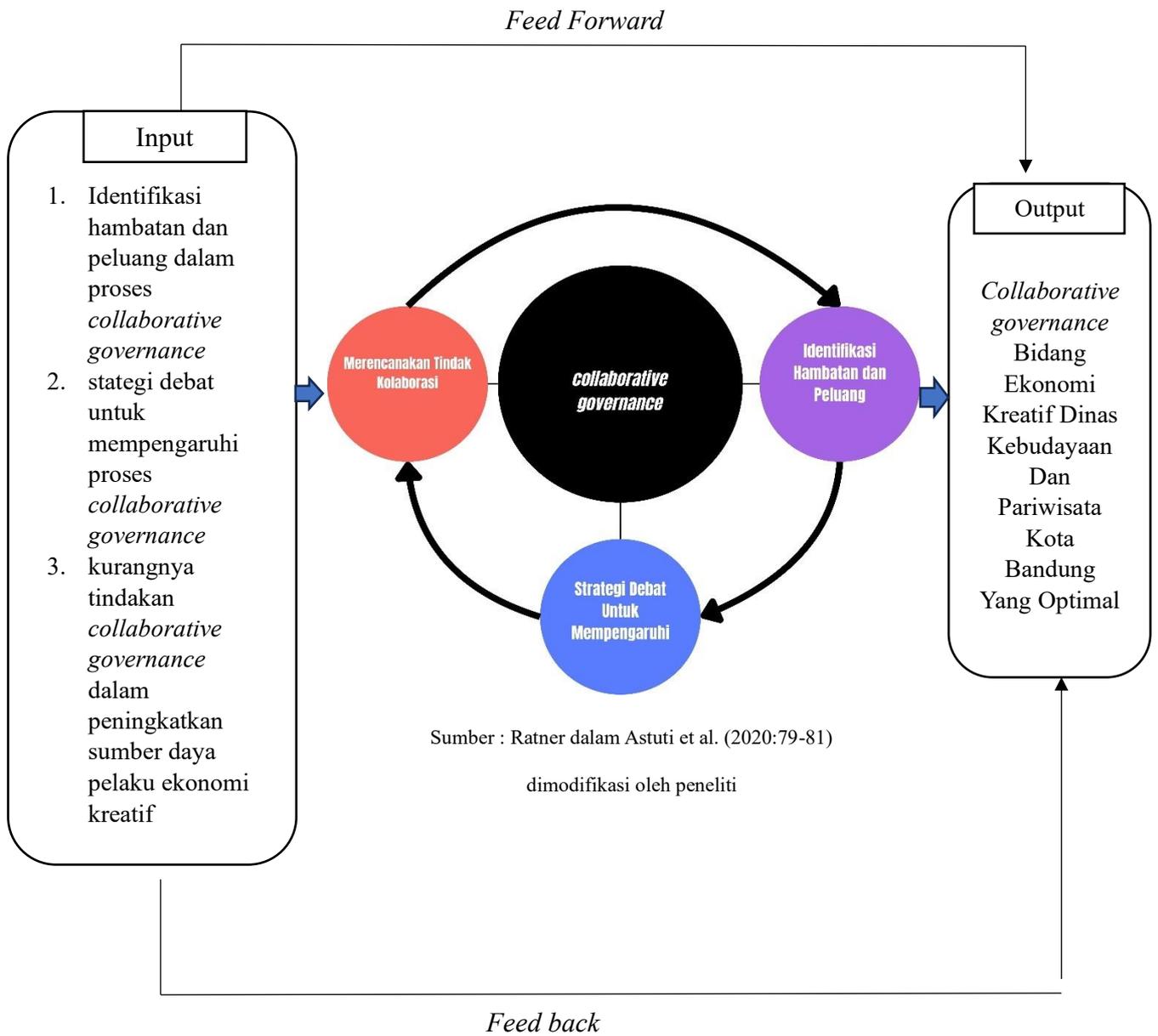
Tiga Tahap Penilaian *Collaborative governance* dan Perencanaan Tindakan

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kerangka mengalirkan jalan pikiran yang logis (*logical construct*). Dengan perkataan lain, menyusun kerangka pemikiran sesungguhnya diarahkan untuk menjawab secara rasional atas masalah yang telah di rumuskan. Selain itu, kerangka pemikiran juga harus mencerminkan hubungan antar variabel yang diteliti. Satibi, (2017:105)

Peneliti menggunakan teori Ratner dalam Astuti et al. (2020:79-81) bahwa di dalam *Collaborative governance* terdapat tiga fokus fase atau tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi yang meliputi:

- 1) Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportimoties*)
- 2) Strategi Debat Untuk Mempengaruhi (*Debating Stategies for Influence*)
- 3) Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*)



Sumber : Peneliti, (2023)

Gambar 2. 2
Kerangka Berpikir

2.3 Proposisi

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disajikan di atas, maka hal yang menjadi proposisi dari penelitian mengenai *Collaborative governance* di Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung dapat dijabarkan sebagai berikut ini, yaitu terwujudnya *Collaborative governance* pada Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung yang optimal melalui dimensi *collaborative governance* menurut Ratner dalam Astuti et al., (2020:79-81) dengan terealisasi dimensi tersebut, maka akan terciptanya *collaborative governance* Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung dapat berjalan dengan optimal.